BAB IV

ETIKA POLITIK AL MAUDUDI

A. Landasan Pemikiran Politiknya

Pemikiran politik al-Maududi mengacu pada apa yang ia sebut dengan istilah "Empat istilah asasi" dalam al-Qur'an. Ke empat istilah itu menurut Maududi menjadi poros dan tema sentral ajaran Islam. Menurutnya hanya dengan memahami dan menghayati empat istilah itu, kaum muslimin akan dapat menghayati dan memahami hakekat ajaran Islam. Pemahaman terhadap empat istilah harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan misi Islam.

Selanjutnya Maududi menyatakan, bahwa seseorang yang ingin malakukan studi terhadap al-Qur'an secara benar, ia harus memahami terlebih dahulu empat istilah asasi dalam al-Qur'an itu, sebab semua surat dan ayat yang berisi petunjuk, sejarah, hukum dan lain-lain sebetulnya berpusat pada ungkapan dibawah ini :

> Bahwasanya, Allah SWT, adalah Ilah satu - satunya, Yakni Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. adalah satu-satunya Rabbul Alamin, Yakni pemilik dan penguasa utama seluruh alam semesta dan segenap penghuninya. Dia tida beranak dan tidak diperanakkan, tiada yang menjadi sekutu Allah, baik dalam Uluhiyah, maupun Rububiyah (Dalam kekuasaan maupun ketuhanan-Nya) . Tidak ada Ilah (Tuhan) maupun Rabb (Penguasa) selain Dia (Allah SWT).[1]

---

[1] Abu A'la Maududi, Muqoddimah, Bagaimana Memahami Qur'an , Al Ikhlas, Surabaya, terj. Abdullah Said, 1955

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ungkapan ini, jelaslah bahwa yang perlu dikaji pengertianya secara mendalam dalam al-Qur'an adalah empat istilah, al Ilah, al Rabb, al Ibadah, dan al Din. Jika pemahaman ke empat istilah ini keliru, maka sebagian besar inti dan esensi ajaran islam akan kabur, bahkan akan sirna dari pemahaman dan penghayatan kaum muslimin.

Orang-orang arab sebelum Islam dan sewaktu Islam mulai datang, semuanya mengerti kedua istilah itu, yaitu al-ilah dan al Rabb. Kedua patah kata atau istilah itu, mereka pergunakan dalam percakapan sehari-hari dan pandai juga mempergunakannya. mereka faham betul maksud kedua istilah tersebut dalam sebuah konteks yang berbeda - beda. justru itu, jika mereka mendengar " Tiada Ilah selain Allah dan tiada keilahian dan kerabbian-Nya, mereka paham betul esensi ajaran yang terkandung dalam ungkapan itu, tanpa sedikitpun terselip ketidak jelasan. Jadi, orang yang menentang ungkapan tersebut (kafir), jelas kafir dengan penuh kesadaran terhadap keilahian dan kerabbian Allah. Demikian juga orang yang beriman, ia beriman dengan penuh kesadaran dan pengertian yang mendalam terhadap dampak dan akibat penerimaan akidah baru itu. [2]

Demikian juga dua istilah yang lain, yakni al - Ibadah dan al-Din sebab dua istilah terakhir ini sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. mereka paham maksud al- abd, tindakan yang disebut al- ubudiyah, serta

---

[2] I b i d, hal. 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara praktis yang disebut al-Ibadah. Mereka juga paham kedudukan dan pengertian al-Din. Jadi setelah mereka mende ngar seruan al-Qur'an agar kamu beribadah kepada Allah dan jauhilah Taghut [3], dan masuklah kedalam (agama) Din Allah dengan melepaskan semua agama (al-adyan) yang lain, mereka tidak keliru dalam memahami inti da'wah al-Qur'an itu.

Setelah kaum muslimin melewati masa kejayaan, empat istilah asasi dalam al-Qur'an itu mengalami perubahan dan penyempitan pengertian dengan dalalah yang tidak jelas. I ni bisa terjadi, karena dua faktor utama. Pertama, karena semakin menipisnya rasa kearaban (al zauqul arabi) yang murni dikalangan kaum muslimin dimasa itu. Kedua, kaum muslimin yang dilahirkan ditengah-tengah masyarakat islam dan dibesarkan disana tidak menemui pengertian empat isti lah asasi dalam al-Qur'an itu, seperti diturunkannya al-Qur'an. Akibatnya, para penyusun kamus dan penafsir kata - kata dalam al-Qur'an mengartikan empat istilah itu de- ngan pengertian yang berkembang pada masa terakhir seba - gai ganti dari pengertian aslinya. Disini dapat diajukan perubahan pengertian tersebut, misalnya :

Kata al Ilah diartikan pahala dan patung

Kata al Rabb diartikan pendidikan atau lembaga pen- didikan yang diserahi pendidikan moral dan pengembangannya.

---

[3] I b i d, hal. 10. Dan lihat al-Qur'an surat al-Nahl, ayat 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata al- Ibadah diartikan penuhanan, taat dan salat dihadapan Allah SWT.

Kata al Din diartikan sama dengan arti Nihlah atau agama, kata taghut di artikan dan titafsirkan dengan berhala dan syetan.[4]

Perubahan pengertian ini menurut Maududi kemudian menjadi keyakinan kebenaran Islam dikalangan kaum muslimin. Kekeliruan pengertian ini menjadi pangkal penyebab kelemahan Aqidah dan mundurnya semangat jinad kaum muslimin, walaupun mereka menerima islam sebagai agama mereka.

Ungkapan Maududi yang cukup radikal ini banyak mendatangkan reaksi, baik yang pro maupun yang kontra, baik di India, Pakistan maupun di Mesir.

Untuk memperjelas landasan pemikiran politik Maududi yang sekaligus menjadi metode pemahamanya terhadap al-Qur'an dan al- Sunnah, kiranya perlu dikemukakan penjelasan Maududi tentang empat istilah asasi dalam al Qur'an, yang antara lain :

1. Al- Ilah

Maududi mengemukakan enam arti al-ilah ditinjau dari segi bahasa, yaitu diambil dari akar kata berikut :

(الهت الى فلان) aku cenderung kepada fulan.

(الله الرجل بالله) Ia mengharapkan seseorang yang akan bisa menolongnya karena suatu musibah.

---

[4] I b i d, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(الله الرجل الى الرجل) Menuju kepadanya, karena sangat rindu.

(الله الفصيل) Tidak mau pisah dengan Induknya.

(الله الاهة الوهة) Berarti menyemban.

(الاله) Merupakan pecahan dari (لاه يلوه ليها) Yang berarti berlindung - lindungan.[5]

Selanjutnya Maududi menjelaskan bahwa kata (الاله) digunakann untuk arti ibadah (اله يالـه الهـة) dengan pengertian tuhan yang menjadi obyek ibadah (المعبود).[6] Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Motivasi manusia beribadah dan menuhankan sesuatu terletak pada kepentingan dan kebetuhannya. Selamanya manusia tidak kan menuhankan dan menyembah sesuatu, jika ia tidak punya keyakinan bahwa sesuatu itu dapat memenuhi kebutuhan dan menolongnya, jika ia dalam keadaan bahaya dan dapat menenangkannya jika ia dalam kedaan cemas dan takut.

b. " Sesuatu" yang diyakini sebagai penolong dan penerima permohonan, jelas mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi. Lebih dari itu, ia diyakini sebagai yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan.

---

[5] I b i d, hal. 2. Sayangnya Maududi tidak mengutip - langsung arti kata al Ilah dari kitab-kitab ma'ajim dan kamus bahasa Arab. Ia hanya mengutip dari tafsir Ibnu Kasir, an Nisaburi dan at Tabari.

[6] Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi Dan Dokumentasi, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan itu tidak berjalan menurut hukum kausalitas. Tetapi berjalan diluar jangkauan akal dan pengetahuan (irrasional)

d. Sudah menjadi hukum alam, jika seseorang berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, penolong dan penenang jika ia dalam keadaan gundah untuk "menghurmati" sesuatu itu sebagai ungkapan rasa cinta yang membara.

Dengan berpedoman kepada ayat ayat al-Qur'an (Q.S. Maryam; 81, Yasin ; 74, Hud ; 101, an Nahl; al Qasas ; 88, Yunus; 66), [7] Maududi memberikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Masyarakat Jahiliyah menjadikan sebagian anggota mereka sendiri sebagai Ilah (Tuhan); mereka mohon perlindungan jika ada bahaya mengancam dan berdo'a untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Yang mereka anggap sebagai Ilah tidak hanya Tuhan, Jin, Malaikat, dan Patung saja, tetapi para tokoh manusia yang sudah mati.

c. Mereka berkeyakinan bahwa yang dianggap Ilah (Tuhan) itu pasti dapat mendengar permohonan dan mampu untuk memberi pertolongan.

d. Maududi menganggap mohon pertolongan yang dilakukan melalui hukum kausalitas yang rasional tidak termasuk alam katagori penuhanan seperti pertolongan dokter terhadap pasienya dan pertolongan pembantu

---

[7] Abu A'la Maududi, Memahami al Qur'an, Op-Cit, hal. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tuanya, tetapi, jika seseorang minta pertolongan kepada seorang wali atau kepada patung untuk menghilangkan dahaga, maka wali dan patung itu sebagai Ilah (Tuhan). Sebab berkeyakinan bahwa Wali Patung itu mempunyai kekuasaan merubah hukum kausalitas.

e. Keyakinan dan anggapan bahwa perintah dan larangan seorang pada sesuatu yang lain itu sebagai Syari'at, walaupun mereka tidak menyembahnya. Maududi mengacu pada surat al Taubah ayat 31 dan al Syura ayat 21.

f. Seorang yang menuruti hawa nafsu dengan keyakinan bahwa nafsunya itu sebagai kekuasaan tertinggi, berarti ia telah menjadikan nafsunya sebagai Ilah (Tuhan), Maududi mengacu pendapatnya itu kepada Q.S. al Furqan ; 43.

g. Pembuat undang-undang, peraturan dan tata tertib tanpa memperhatikan Allah, berarti ia telah menyamai Allah didalam keilahianya.

h. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan mutlaq dalam mengatur jagad raya ini adalah hak Allah semata.

i. Beberapa poin tersebut di atas oleh Maududi dijadikan dasar "ketidakbenaran" dan "kesesatan" keilahian (anggapan sebagai Tuhan) selain Allah.

Selanjutnya Maududi beranggapan bahwa keilahian dan kekuasaan adalah dua mata rantai yang saling melengkapi. menurutnya, tidak ada perbedaan pokok antara keilahian dan kekuasaan dalam esensi dan makna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang tak punya kekuasaan tidak mungkin menjadi "Ilah" dan tak pantas untuk dijadikan "Ilah" sebaliknya sesuatu yang mempunyai kekuasaan dapat menjadi " Ilah " , dan Dia yang pantas untuk itu. Sebab, pemenuhan kebutuhan terhadap adanya bahaya yang mengancam seseorang, itu memerluka kekuasaan. Justru itu tidak ada artinya keilahian-tanpa adanya kekuasaan. Dari kesimpulan global ini,Maududi merinci pemikiran yang terkandung dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut :

a. Perbuatan-perbuatan: Pemenuhan kebutuhan, penolakan marabahaya, pemberian pahala, pemberian taufiq, kemenangan, pengawasan, perlindungan, dan diterima atau di tolaknya do'a, berkaitan erat dengan kekuasaan dan kekuatan yang mengatur jagad raya ini.

b. Kekeuatan dan kekuasaan tersebut tidak dapat di bagi - bagi. Misalnya kekuasaan mencipta berada dalam satu tangan seseorang, dan pembagian rizqi ada ditangan orang lain. Sebab yang demikian itu akan menyebabkan ketidak setabilan, karena masing-masing mempunyai kekusaan mutlaq.

c. Kekuasaan itu harus ada dalam kekuasaan satu tangan dan tak ada satupun yang ikut campur dalam kekuatan mutlaq itu. Jika demikian , maka keilahian hanya khusus untuk Nya dan tak ada satupun yang menyamainya.

d. Kekuasaan mutlaq menuntut adanya penguasa tunggal yang mempunyai kekuatan memaksa. Dan penguasa tunggal itu menurut penjabaran al- Qur'an tidak ada lain kecuali Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengacu kepada Q.S. al Zuhruf; 84, an Nahl;17 20, 22, Fatir; 3, al An'am; 46, Saba' ; 22-23, al Zumar ; 5-6, an Naml; 60-64, al Furqon; 2-3, al Baqarah; 42 - 43, Ali Imran; 26, an Nas; 1-3, al Anbiya'; 22-23,[8] Maududi menegaskan keilahian Allah SWT. meliputi kekuasaan meme - rintah dan melarang tanpa adanya yang menyamai-Nya.

2. Al Rabb

Al Rabb secara etimologi mempunyai arti mengasuh atau memimpin,[8] al-Rabb juga mempunyai arti " al Murabbi " (yang mendidik dan memelihara). Maka sudah sewajarnyalah bila "al Murabbi" harus selalu ditaati perintahnya.[9] kata (Rabbun), terdiri atas huruf " Ra" dan "Ba" tasy didi yang merupakan pecahan dari kata (Tarbiah) yakni pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya. Selain dari pada itu, maka kata tersebut juga mencakup banyak arti yaitu : Kekuasaan, pelengkapan, pertanggung jawaban , perbaikan, perbaikan , penyempurnaan, dan lain sebagainya. Sebab itu, maka kata tersebut merupakan suatu predikat bagi suatu kebesaran, keagungan, kekuasaan dan kepemimpinan, dan lain sebagainya.[10] Kata al Rabb juga mempunyai arti: sang penguasa yang intruksinya pasti dipatuhi oleh yang berada dibawah kekuasaan-Nya.[11]

---

[8]Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia,Yayasan penye - lenggara Penterjemah/ Pentafsiran al Qur'an, Jakarta,1973, hal. 136

[9]Abu A'la Maududi, Politik Alternatif Suatu perspektif Islam, Gema Insani Pers, Jakarta,1991, hal. 18

[10]Al Maududi, Memahami al Qur'an, Op-Cit,hal. 26

[11]Al Maududi, Politik Islam, Op-Cit, hal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengemukakan beberapa contoh yang dikutip dari berbagai pengertian al Rabb, Maududi menyimpulkan arti al Rabb sebagai berikut :

a. Pendidik yang diserahi pengembangan pendidikan yang bertanggung jawab.
b. Penanggung jawab dan pengawas serta yang memperbaiki perjanjian.
c. Pemimpin atau tokoh yang selalu dikelilingi para anggota pengagumnya.
d. Pemimpin yang ditaati, dan mempunyai kedaulatan yang diakui ketinggianya dan kekuasaannya serta mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu.
e. Raja atau tokoh yang disegani dan dihurmati.

Kelima arti al Rabb tersebut diambil dari pengertian beberapa ayat al Qur'an : Q.S. Yusuf; 23, al Syura ; 77-80, an Nahl; 53-54, al An'am; 164, al Muzammil; 9, Hud; 34, al Zumr; 7, al Saba' ; 26, al An'am; 37, Yasin; 51, al Taubah; 31, Ali Imran; 64, Yusuf, 41-42, Quraisy; 3-4, al-Saffat; 180, al Anbiya'; 22, al Mukminun; 86, al Saffat; 5 dan al Najm; 49.[12]

Disini terdapat idiomatik antara al Ilah dan al Rabb, oleh karena itu al Rabb juga mempunyai arti pemilik (al Malik) dan Tuan (Sayyid) yang harus ditaati, seperti ungkapan "pemilik harta dan tuan rumah", juga termasuk sesuatu yang memberi rizqi dan mendidik manusia, yang memberi kasih sayang, rasa aman, ketinggian dan kemuliaan.

[12] al Maududi, memahami Qur'an, Op-Cit, hal. 28-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah perjuangan para rasul dengan ummatnya seper ti yang termaktub dalam al Qur'an, menurut Maududi adalah bukti nyata kesesatan dalam memahami, menghayati dan meyakini ke Tuhanan sebagai pemelihara jagat raya (al Rubbubiyah). Ummat nabi Nuh, Hud, Saleh, lbrahim,[13] Luth , Syu'aib, Musa, [14] lsa dan kaum Musyrikin Arab, pada hakekatnya tidak ingkar terhadap wujud Allah, dan Dia-lah yang menciptakan jagad raya ini. Dan sebagai Rabb dalam arti yang pertama dan ke dua, juga mereka tidak ingkar bahwa Allah itu sebagai Ilah mereka.

---

[13]Para mufassir umumnya keliru dalam memaparkan kekafiran raja Namrud yang konon mengaku sebagai Tuhan, , Menurut Maududi, Namrud itu percaya akan wujud Tuhan. Ia hanya mengakui sebagai Rabb dalam arti ketiga, keempat dan kelima. Rakyat Namrud hanya percaya bahwa magnit-magnit di luar angkasa bersarekat dengan Allah dalam kerabbian dalam arti pertama dan kedua. Berdasarkan penelitian arkeologi - di kota Ura tempat kelahiran lbrahim as. Ditemukan bukti-bukti bahwa rakyat ditempat itu dulu menyembah tuhan yang diberi nama Fannar. Pada suatu tempat yang bernama Larsah, diperkirakan rakyatnya dulu menyembah Tuhan Matahari. Sedangkan pendiri kerajaan itu bernama Arenmu yang kemudian di beri nama Namrud. Nama Namrud kemudian menjadi gelar bagi raja-raja yang berkuasa ditempat itu. ibid, hal 33-38

[14]Menurut Maududi telah terjadi kesalahan fatal dikalangan kaum muslimin yang menyatakan Fir'aun tidak hanya ingkar kepada Allah swt. tetapi ia juga mengakui sebagai - Tuhan yang harus disembah (al-Illah). Jika betul demikian, betapa bodohnya rakyat Mesir yang mau percaya terhadap pengakuan Fir'aun itu. Yang benar menurut Maududi dengan dasar pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan ditopang dengan bukti-bukti historis, kesesatan Fir'aun dan rakyatnya itu tidak berbeda dengan kesesatan Namrud dan rakyatnya. Perbedaan ini hanya terletak pada rasa dan jiwa nasionalisme sempit terhadap Bani Isra'il, sebagai refleksi ke khawatiran rakyat pribumi Mesir terhadap pengeruh Nabi Yusuf dan keluarganya yang datang dari Isra'il. Untuk jelasnya, Ibid., hal.55-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertentangan antara rasul dan ummatnya itu berkisar pada dua persoalan prinsip dalam ketauhidan. Pertama, mereka tidak mengakui Allah sebagai Ilah satu-satunya, sebab menurut mereka disana masih ada Ilah dan Rabb yang lain yang ikut serta dalam mengatur jagat raya ini. Ilah dan Rabb yang terakhir ini erat hubungannya dengan kebutuhan mereka. Justru itu, mereka harus beriman kepada Ilah dan Rabb yang lain disamping beriman dan yakin kepada Ilah (Allah). Kedua mereka beriman akan kerabban Allah itu hanya dasri sisi pencipta dan pengatur jagad raya ini.Tetapi Allah tidak satu-satunya penguasaan dan kedaulatan bidang moralitas, sosial, politik, dan semua bidang kehidupan manusia. Mereka juga tidak percaya bahwa hanya Allah yang dapat memberi petunjuk , pemegang otoritas - Syari'at dalam perintah dan larangan yang harus ditaati .

Mereka sulit menerima seruan rasul untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Ilah dan Rabb, karena mereka sudah terlanjur mengangkat pemimpin - pemimpim mereka dan para agamawan sebagai Rabb dan Ilah. Sedang Para rasul berjuang dan ber-dakwah secara terus menerus - untuk menjadikan Allah Swt. Sebagai satu-satunya Rabb dan Ilah satun-satunya dan menyerukan ummatnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjahui terhadap apa yang telah dilarang-Nya.

Atas dasar penelitian yang cukup cermat terhadap kisah-kisah kesesatan dalam alQur'an, Maududi menyimpulkan kesesatan tersebut dibagi dalam dua katagori. Pertama, ar Rabb dalam arti menanggung, mengatur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik jagad raya, memelihara dan melindungi dan memenuhi kebetuhan hidupnya di luar hukum kausalitas. di yakini Allah sebagai Tuhan pemelihara (ar Rabb). Tetapi Allah itu bukan satu-satunya rabb, mereka berkeyakinan bahwa Allah itu bersekutu dengan para malaikat, jin, kekuatan Gaib, Bintang-bintang, Planet, Para Nabi, para Wali dan para Pemimpin mereka.

Keuda ar Rabb berarti pemegang otoritas perintah dan larangan, pemegang kedaulatan tertinggi, sumber petunjuk, sumber hukum dan Syari'at, penguasa Negara dan Kerajaan. Keyakinan mereka beraneka ragam. Ada yang berkeyakinan bahwa diri Manusia itu sebagai Rabb, bukan Allah, ada yang menyerah kepada diri manusia tersebut dalam aspek moral, peradapan, hukum, dan politik. Walaupun secara teoritis mereka mengakui Allah sebagai Rabb. Kesesatan terakhir ini terus berjalan sepanjang sejarah. Untuk meluruskan kesesatan itu, Allah SWT. Selalu mengutus para Rasul. Misi da'wah mereka berpusat pada pemberian petunjuk yang benar tentang keyakinan terhadap Allah SWT. Sebagai pemelihara (al Rabb) dalam kelima arti tersebut di atas, tanpa adanya sekutu dengan yang lain. Semua misi yang di emban para Rasul di satukan dalam satu pernyataan yang berada dibawah suatu sistem hidup manusiawi, yakni adil, tidak berlaku pihak hamba atau tuan, abdi atau tuan, semua merupakan satu kesatuan dari hamba Allah dan ajaran Tauhid. [15]

---

[15] Al Maududi, Politik Alternatif, Op-Cit, hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al Ibadah

Secara etimologi Ibadah berasal dari bahasa Arab (عبد يعبد عبودة) yang berarti beribadah, pemujaan, penyembahan.[16] Ibnu Mandur dalam lisanul Arab dengan merujuk akar kata abada mengemukakan beberapa arti dengan penjelasan sebagai berikut :

a. (العبد) berarti hamba yang dimiliki, lawan orang merdeka. Misal (تعبد الرجل) berarti hamba yang mengambil sebagian budak atau memperlakukan seperti Budak.

b. (العبادة) taat dengan merendahkan diri, misalnya (وعبد الطاغوت) menyembah dengan rasa rendah d diri kepada Tagut.

c. (عبد به) selalu berkumpul, tak mau berpisah.

d. (المعبد) menuhankan sesuatu, kemudian menyembahnya .[17]

Dari beberapa arti tersebut dapat diketahui bahwa kata abada mempunyai konotasi pokok kepatuhan seseorang terhadap ketinggian dan kehebatan orang lain, dengan melepaskan kebebasan dan kemerdekaannya tanpa perlawanan.

Atas dasar pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan kata Ibadah dalam ayat-ayat al Qur'an. Maududi menyimpulkan penggunaannya dikhususkan untuk arti menuhankan, menyembah dan patuh. Tetapi dakwah al Qur'an mencakup ibadah dalam pengertian ketiga-tiganya yang secara

---

[16] Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hal.886-887

[17] Ibnu Mandur, Lisanul Arab, Juz 4, Daru Fikr, Bairut, 1983, hal. 262-267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang secara ikhlas ditujuka kepada Allah SWT. tanpa ada sesuatu yang disekutukanNya.

Keikhlasan beribadah hanya untuk Allah itu sangat erat kaitannya dengan pengakuan terhadap Allah SWT.Sebagai Ilah dan Rabb. Sebab jika seseorang dengan penuh kesadaran telah mengakui Allah sebagai Ilah yang harus disembah dan sebagai Rabb pemelihara dan penentu perjalanan jagad raya tanpa ada sekutu bagi Nya, maka secara otomatis dalam dirinya akan timbul motivasi untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ia menjahui segala bentuk penghambaan dan peribadatan selain kepada Allah, baik terhadap nafsu, syetan, jin, malaikat, maupun terhadap raja, pemerintah dan tagut, yang oleh Maududi diartikan tiranis baik perorangan, kelompok, maupun sistem pemerintahan yang mengingkari Allah dan syari'atNya.

Jika seorang muslim dengan penuh kesadaran mengha - yati dan mempraktekkan ibadah seperti petunjuk al Qur'an, maka ibadah itu akan menjadi modal dasar bagi gerak langkahnya dalam menghadapi semua tantangan hidup yang mengitarinya. Ibadah akan menjadi sarana komunikasi yang efektif antara hamba dengan penciptanya, sehingga ibadah itu menjadi pandangan hidup, dasar berfikir, dasar komunikasi dengan dunia luar, dalam menentukan prilaku dan mengatur kegiatan kemanusiaan secara umum. Pandangan dan al Ilah, ar Rabb, al Ibadah seperti yang penulis jelaskan diatas, oleh Maududi disebut sebagai misi Tauhid yang mendasar dalam pemikiran politik Islam.[18]

---

[18] Abu A'la Maududi, Politik Altenatif, Op-Cit, hal. 12-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Al-Din

Kata al-Din dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa arti :

a. Kekuasaan dan pemaksaan untuk taat, seperti kata (دان الناس) memaksa mereka untuk taat.

b. Agama atau al Millah.[19]

c. Pembalasan.[20] Seperti kata (دينهم فدانوا) yang menguasai hari pembalasan

d. Hukuman atau penghitungan. seperti pepatah Arab (دنت القوم) apa yang anda perbuat akan dibalas seperti perbuatan anda.

e. Taat pada seseorang dengan menerima penghinaan dan kekuatan, seperti (دان الرجل) kupaksa mereka, kemudian mereka patuh.

f. Syari'at, hukum, undang-undang, sistem, agama dan tradisi, seperti (دينه) jika sudah biasa melakukan perbuatan baik atau tercela. Dan seperti pepatah Arab (دينه القوم). Orang-orang Quraisy dan orang-orang yang mengikuti sistem dan tradisi mereka dan perkataan (دين فلان). Ia mengikuti batasan dan aturan-aturan tradisi yang berlaku dikalangan ummatnya, seperti aturan perkawinan,talak, waris dan lain-lain yang berkaitan dengan soal kemasyarakatan.

---

[19] Ahmad Warson Munawir, Op-Cit, hal. 437

[20] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta, juz 1, 1996, hal. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui, bahwa kata al-Din digunakan dalam arti pokok yaitu :

a. Kekuatan dan pemaksaan dari penguasa tertinggi.

b. Taat dan patuh serta menghamba terhadap orang yang mempunyai kekuasaan.

c. Aturan, Undang-undang, tradisi, dan sistem yang dianut.

d. Pembalasan, hukuman dan siksaan.

Semua arti tersebut digunakan dalam al-Qur'an baik yang berarti pemerintahan maupun yang berarti kekuasaan tertinggi.[21] Taat dan patuh terhadap kekuasaan dan pemerintah itu.[22]

---

[21]Maududi merujuk Q.S. Yunus; 104-105, Yusuf; 40, ar-Rum; 26, 28-30, an Nur; 2, at Taubah; 36, Yusuf; 76, al-An'am 137. Yang dimaksud dengan mengkaburkan agama dalam ayat terakhir, adalah para pemimpim yang menciptakan aturan sendiri kemudian mereka menghubungkan aturan itu dengan perintah agama, agar rakyat berkeyakinan bahwa aturan itu adalah bagian dari ajaran agama. Lihat juga QS. al-Syu'ara; 21, al Kafirun; 6. Kata al-Din dalam dua ayat terakhir berarti undang-undang, batasan-batasan, Syari'at metode dan sistem berfikir yang mengikat seseorang untuk mematuhi. Jika sumber hukum dan undang-undang itu berasal dari Allah, ia berarti mengikuti agama (al Din) Allah, Tetapi jika kedaulatan, hukum dan undang-undang yang ada tidak bersumber dari Allah; itu berarti sumber itu muncul dari penguasa yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, lihat Maududi, Op-Cit, hal. 127-131.

[22]Lihat Q.S. Ali Imran; 19-85, al Taubah; 33, al-Anfal; 39, al Nasr; 1-4. Maksud kata al Din dalam ayat-ayat diatas adalah sistem kehidupan secara menyeluruh, baik idiologi, pemikiran moral, politik, dan lain-lain. Dalam dua ayat pertama kata al Din berarti sistem kehidupan yang diridlai dan ketaatan mutlak kepada-Nya. Dalam ayat ketiga, Allah mengutus para Rasul dengan membawa sistem kehidupan yang benar. Untuk kebahagiaan manusia, ayar ke empat memerintahkan dan memerangi serta membasmi sistem kehidupan yang berdiri atas dasar menentang Allah. Ayat terakhir menjelaskan kesuksesan perjuangan Muhammad melalui serangkaian perjuangan dan jihad selama dua puluh tiga tahun, dengan tegaknya sistem kehidupan akhlak, pendidikan, peradapan, sosial, politik, dan ekonomi. Untuk lebih jelas nya lihat Maududi, Bagaimana memahami Qur'an, Ibid, hal. 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah pengertian kata al Din yang digunakan dalam semua konteks kalimat dalam bahasa Arab dan al Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita temukan juga penggunaan kata al Din dalam al Qur'an sebagai kata yang mengandung istilah yang menyeluruh, yakni sistem kehidupan yang berupa undang-undang dan hukum dari penguasa tertinggi yang mengikat gerak langkah kehidupan seseorang untuk dapat mematuhi sistem kehidupan itu dengan harapan mendapatkan prestise dan supermasi derajat dan rasa takut untuk melanggar sistem dari ancaman kehinaan atau akibat yang tak diinginkan.

Empat istilah asasi dalam Qur'an, dalam pemikiran Maududi dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

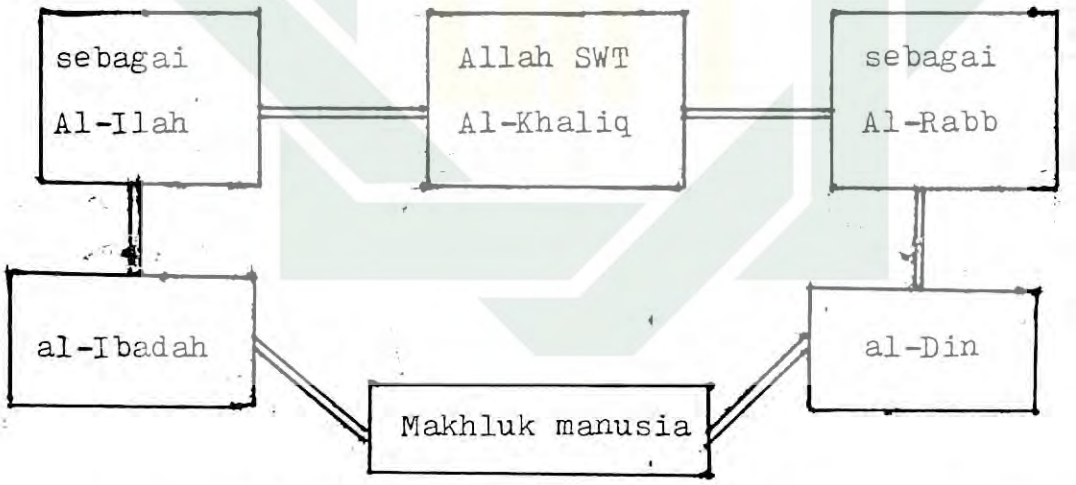

Keempat istilah tersebut oleh Maududi dijadikan pedoman dasar dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan sebagai kinci pemahaman terhadap beberapa aspek ajaran-ajaran Islam yang lain, namun tekanan utama yang yang di kembangkan oleh Maududi lebih terfokus pada sistem pemerintahan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pemahaman ajaran islah yang bertumpu pada pengertian Empat istilah dalam al-Qur'an, yang kemudian menelorkan pemikiran Politik Islam, dapat kita ketahui dengan jelas, jika kita menelaah kitab tafsir tulisan Maududi yang berjudul "Tafhimul Qur'an".[23]

Rumusan pemikiran politik Maududi di atas dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

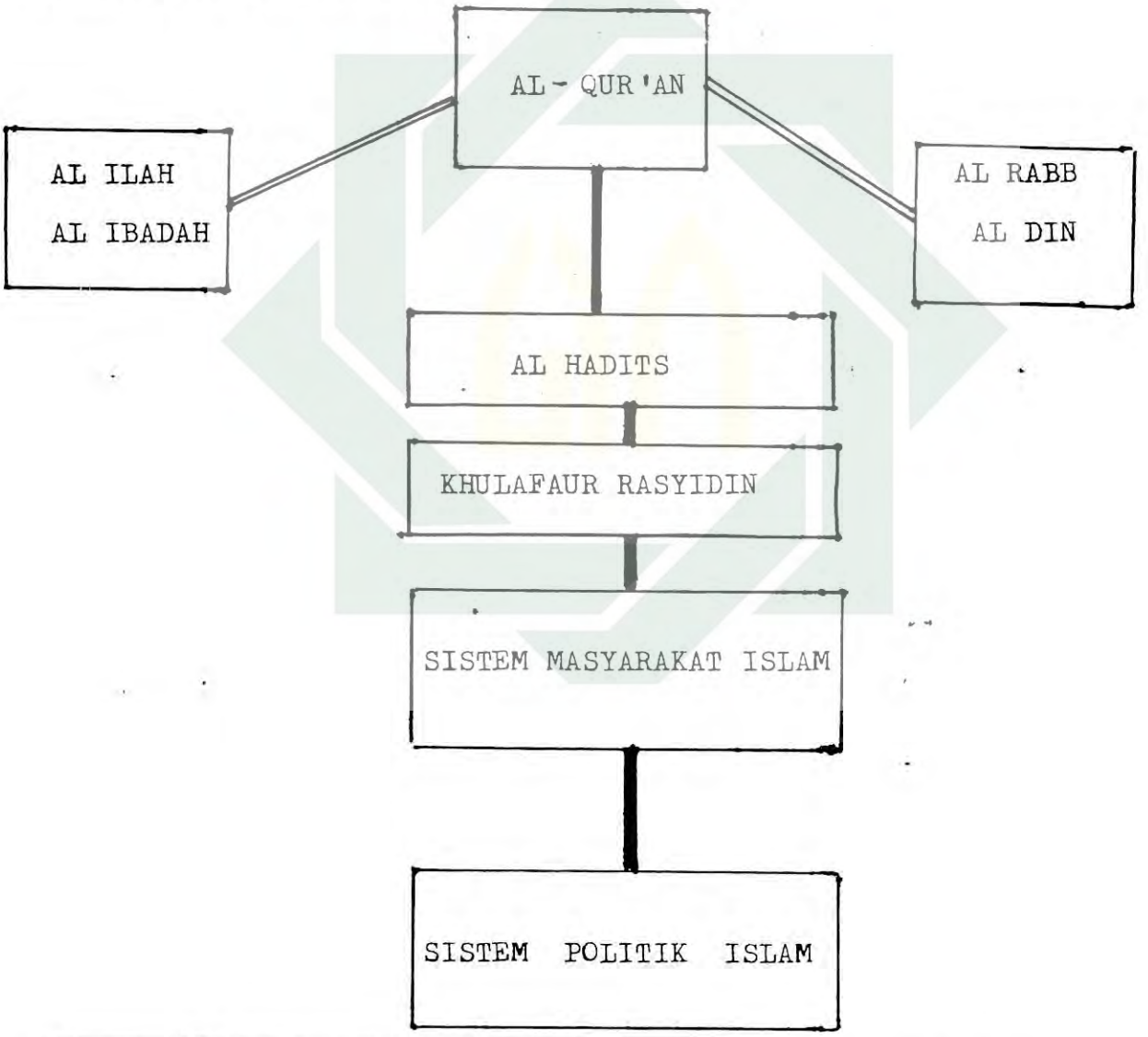

[23]Abu A'la Maududi, Tafhimul Qur'an, al Ikhlas, Surabaya, ter. Abdullah Sa'id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Prinsip-prinsip Etika Politiknya

1. Otoritas kedaulatan Tuhan

Pemahaman empat istilah asasi dalam al-Qur'an, seperti yang penulis paparkan pada pasal sebelumnya, menurut Maududi harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata, sebagai refleksi keimanan seorang muslim. Sebetulnya pemahaman Abu A'la Maududi terhadap empat istilah asasi tersebut tidak banyak berbeda dengan pendapat para ulama' terdahulu, andaikan Ia tidak mengaitkan pemahamannya itu dengan konteks sistem kekuasaan. Yang lebih menarik lagi adalah konsekwensi premis yang ditarik oleh Maududi dari empat istilah asasi tersebut baginya menerima al Ilah dan al Rabb berarti melepas semua urusan pembuatan undang-undang dari tangan manusia seraya menyerahkan kepada yang berhak, dalam hal ini Allah SWT.

Ditinjau dari teori politik moderen atau teori politik sekular, teori politik Islam seperti yang dikembang kan oleh Maududi kelihatan unik bahkan mungkin ganjil, keunikan atau keganjilan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (Sauverenitas) ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia.

Berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan. Dalam kenyataannya, kata-kata kedaulatan rakyat seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam

---

[24] Abul A'la al-Maududi, Khilafah Dan Kerajaan, Mizan, Bandung, 1993, hal. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebannyakan negara demokrasi, hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu. Sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara.[25]

Sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri, berasal dari kata "Demos" yang berarti rakyat dan "Cratein" yang berarti pemerintahan, dengan kata lain demokrasi adalah, pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar sistem perwakilan. Orang biasa mengatakan pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.[26]

Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung dapat menyampaikan pendapatnya. Biasanya pelaksanaan sistem demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih dan ditunjuk sendiri oleh rakyat, dan tidak ditunjuk dari atas.Berdasarkan hak-hak asasi manusia, setipa warga negara dengan sistem demokrasi memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, atau mendirikan organisasi politik tandingan (oposisi). Pemerintahan demokrasi didasarkan pada suatu undang-undang dasar dan pelaksanaanya diawasi oleh wakil rakyat, dengan demikian, kekuasaan dapat diserahkan kepada kelompok yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum.[27]

---

[25] I b i d, hal. 19

[26] Mas'ud Khasan Abdul Qodal et.al., Kamus Istilah Pengetahuan Populer, Mizan, Bandung, 1992, hal. 56

[27] B. Setiawan et.al., Ensiklopedi Nasional Indonesia,Cipta Adi Pustaka, Jakarta,1990, hal. 909

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri-ciri demokrasi itu belum tentu belum tentu identik dengan Islam dalam segala hal.[28] Karena ia adalah suatu sistem untuk mencapai hukum yang kekuasaannya ada di tangan seleuruh rakyat. Undang-undang yang terdapat dalam negara demokrasi tidaklah dapat diganti kecuali dengan kesepakatan bersama, dan tidak dijadikan hasil sepakat kecuali menurut tilikan akal mereka. Jadi perubahan undang-undang di negara demokrasi itu merupakan hal yang di setujui oleh mereka sendir.[29]

Tanpaknya Abu A'la Maududi sangat memahami praktek kedaulatan rakyat sebagaimana yang dikemukakan oleh teori demokrasi. Siapapun yang mendalami praktek demokrasi memang akan menyadari bahwa yang paling sering berlaku ada - lah hukum besi oligarki (the irom iron of oligarchi), ya itu sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial, ekonomi, nega ra tanpa harus menenyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya.[30] Sekelompok oligarh tersebut,yang berkuasa atas nama rakyat, selalu berusaha memperpanjang , bahkan jika mungkin melestarikan dan memonopoli kekuasaan yang di pegangnya dengan selubung idiologi tertentu, dengan dalih konsensus nasional dan tindakan semacam, dan pada saat yang sama para oligarch tersebut memojokkan setiap oposisi yang menentang legitimasi pemerintahannya dengan tuduhan subversi, disloyalitas pada negara.

---

[28] Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi, Op-Cit, hal. 29

[29] I b i d,hal. 29

[30] Abul A'la Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Mizan, Bandung, ter. Muhammad al Baqir, 1993, hal. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maududi berpendapat bahwa, biasannya suara mayori-yang menentukan sistem demokrasi dapat menjurus kepada kesalahan-kesalahan fatal, karena mesin propaganda yang di gerakkan oleh pemerintah dapat saja menciptakan suara mayo ritas yang telah di atur.[31] Itulah sebabnya Maududi tidak bergairah dan tidak sependapat serta tidak menyetujui demokrasi seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan negara moderen, yang ternyata sistem poltik yang dianggap palinng moderen gagal menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio politik dan juga keadilan hukum, jurang pemisah antara lapisan kaya dan lapisan miskin tetap menganga lebar, hak - hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali, dan dalam praktek yang mempe roleh perlindungan hukum hanyalah orang-orang lapisan atas sedangkan rakyat bawah, rule of law merupakan slogan kosong tanpa dapat dirasakan dalam kegiatan sehari-hari.

Penolakan Abu A'la Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat bukan terutama berdasarkan bukti-bukti praktek demokrasi yang terlalu sering menyeleweng, namun terutama berdasar pemahamannya tentang ayat-ayat al Qur'an yang menunjukkan bahwa otoritas dan souverenitas tertinggi adalah di tangan Tuhan. Di sampin itu Tuhan sajalah yang berhak memberi hukum bagi manusia. Manusia tidak berhak men - ciptakan hukum, mementukan apa yang boleh (halal) dan apa yang terlarang.[32] Hukum disini berarti norma-norma dasar

---

[31] I b i d, hal. 20

[32] I b i d, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera bukan hukum-hukum administratif atau hukum-hukum lalu lintas dan lain sebagainnya. Dalam pengertian ini sudah barang tentu manusia diperbolehkan membuat peraturan seter-perinci mung kin.

Pendapat al Maududi tentang otoritas dan souverenitas tertinggi di tangan Allah, didasarkan pada pemahaman nya terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an : Q.S. Yusuf; 40, al Imran; 154,79, al Nahl; 116, al Furqan; 2, Thaha; 6, al-Rum; 4,26, al an'am; 18,57,73, al Baqarah; 29,255, al kahfi; 26, al Hadid; 5, al Mulk; 1, Yasin; 83; al Hasr; 23., ar Ra'du; 16.[33] Dari pemahamannya terhadap ayat-ayat ini Abu A'la Maududi memurunkan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Tidak ada seseorang, sekelompok orang atau bahkan seluruh penduduk suatu negara dapat melakukan klaim atas souverenitas (kedaulatan). Hanya Allah sajalah yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya, seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuham.
2. Tuhan adalah pencipta hukum yang sebenarnya (the real - law giver), sehingga Dia sajalah yang berhak membuat legislasi secara mutlaq. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berasal dari wahyu. Dengan demikian manusia tidak dapat melakukan modifikasi atas

---

[33] Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Op-Cit,hal. 21-27. Dan lihat Abu A'la Maududi al Khilafah dan Kerajaan, hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang telah ditetapkan Allah, walaupun rencana modifikasi itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota perwakilan rakyat.

3. Suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan peraturan dasar dari Tuhan sebagaimana diterangkan oleh Nabi-Nya wajib memperoleh ketaatan rakyat, karena pemerintah seperti itu pada prinsipnya bertindak sebagai badan yang memberlakukan peraturan-peraturan Tuhan.[34]

Dari penjelasan diatas Maududi menentang konsep kedaulatan rakyat a la demokrasi barat. Dilihat dari filsafat politik, apa yang telah dilontarkan oleh Maududi sebenarnya merupakan antitesa terhadap demokrasi barat sekular. Demokrasi barat mengajarkan bahwa kekuasaan mutlaq untuk membuat legislasi berada di tangan rakyat, bahkan penentuan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku juga ada di tangan rakyat. Pembuatan hukum (law-manking) harus harus sesuai dengan selera dan opini publik rakyat.[35]

Menurut Maududi Islam memberikan kedaulatan terbatas pada rakyat, itu sudah jelas. Rakyat dalam teori politik tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan semau-maunya, karena ada peraturan-peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai Ilahi yang harus ditaati. Norma-norma dan nilai-nilai Ilahi itu harus menjadi paradikma program-program sosial, politik dan ekonomi yang di

---

[34] Abu A'la Maududi, Politik Islam konsepsi dan Dokumentasi, Op-Cit, hal 27-28. dan lihat Maududi al Khilafah dan Kerajaan, Op-Cit, hal. 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Dari pengertian prinsipal ini Abu A'la Maududi kemudian menciptakan istilah "theo demokrasi" untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam.

Menurut Maududi, secara esensial theo- demokrasi Islam itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan, dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan.[35]

Disisi lain Maududi berpendapat, theo - demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, karena di bawah naungannya kaum muslimin telah diberi kedau latan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslimin yang juga berhak untuk menumbangkannya.[36]

Dalam pemerintahan theo demokrasi, semua masalah pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak di atur secara jelas dalah syari'ah, diselesaikan berdasar kan mufakat bulat dan konsensus dikalangan kaum muslimin. setiap muslim yang mampu dan mempunyai syarat untuk membe rikan pandangan yang sehat mengenai masalah-masalah hukum Islam, diberikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran hukum itu memang diperlukan.[37]

---

[35]Abu A'la Maududi, Khilafah dan Kerajaan, op-Cit, hal. 24.

[36]Abu A'la Maududi, Sistem Politik Islam, Mizan, Bandung, terj. Asep Hikmat, 1994, hal. 160

[37]I b i d, hal. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lembaga permusyawaratan

Dasar adanya lembaga permusyawaratan sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat di dasarkan firman Allah dalam al Qur'an :

...وشاورهم في الأمر...

Artinya : "...Dan adakanlah musyawarah dalam segala urusan...".[38]

...وأمرهم شورى بينهم ...

Artinya :"...Urusan mereka (dilakukan) dengan permusyawaratan...".[39]

Kedua ayat tersebut menurut Maududi menjelaskan tentang ciri hidup masyarakat Islam yang selalu memutus - kan segala urusan yang menyangkut kepentingan bersama dengan cara musyawarah. Maududi juga menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan suatu bentuk tertentu bagi lembaga permusyawaratan, karena alasan yang cukup sederhana, yaitu bahwa Islam merupakan agama universal sepanjang masa, apakah rakyat harus diminta pendapatnya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka percayai ? dan apakah wakil-wakil tersebut harus dipilih melalui pemilihan umum atau melalui badan formatur ? apakah badan tersebut harus terdiri satu dewan atau lebih. Masalah ini menyangkut detail yang dapat berbeda menurut situasi dan kondisi ma syarakat yang selalu berubah-ubah. Inilah alasan mengapa syari'at Islam membiarkan masalah ini terbuka untuk dapat dipecahkan sesuai dengan kebutuhan.

---

[38] Zainuddin Hamidy et.al., Tafsir Qur'an, Klang Book Centre, Malaysia, 1991, hal. 97

[39] I b i d, hal. 713

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setidak-tidaknya ada tiga pokok ajaran yang dapat diambil dari ayat al Qur'an yang sudah dikutip diatas :

a. Semua urusan dan persoalan yang menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan. Aturan ini berlaku dalam kontek kenegaraan terutama berlaku bagi sistem pengangkatan kepala negara. Oleh sebab itu, Islam anti monarkhi, kesewenang-wenangan dan kediktatoram. Sekali gus kepala negara tidak diperkenankan membatalkan konstitusi secara sepihak, sebab pada masa pembatalan itu ia akan menjadi seorang otokrat dan diktator.

b. Semua rakyat yang berkepentingan harus dimintai pendapatnya secara langsung, atau melalui wakil-wakil yang mereka percayai.

c. Permusyawaratan harus berjalan secara bebas, adil dan ikhlas. Setiap musyawarah yang berlangsung dengan paksaan dan tekanan atau bujukan dan rayuan, sesungguhnya telah menodai tujuan musyawarah itu sendiri.

Bagaimanapun bentuk konstitusi secara mendetail, ketiga prinsip tersebut di atas menurut Maududi harus dipenuhi. Konstitusi harus dapat menutupi celah - celah yang memungkinkan kepala negara dapat kesempatan untuk bertindak diktator tanpa bermusyawarah dengan rakyat atau wakil-wakil yang mereka percayai. Lebih jauh lagi konstitusi Islam harus dilengkapi dengan sistem pemilihan yang memungkinkan seluruh komunitas dapat memberikan pendapat nya tanpa ada rasa takut, pilih kasih atau tipu menipu. Dengan kata lain rakyat diberikan hak sepenuhnya untuk memberikan suaranya tanpa ada tekanan dan paksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kwalifikasi dan tipologi lembaga-lembaga tinggi negara

Seperti yang telah kami jelaskan di atas, bahwa dalam Islam hakim yang sebenarnya adalah Allah SWT. jika kita amati realisasi pelaksanaan konsep kehakiman yang fondamental dalam bumi kaum muslimin, maka kita dapat kita ketahui kedudukan mereka tak lebih sebagai wakil sang hakim tertinggi saja, yang demikian itu merupakan hakekat para pemimpin dalam konsepsi Islam.[40] Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam kitab suci. "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal shaleh, bahwa Dia sungguh sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.[41] (QS. 24: 55).

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan dengan jelas teori Islam tentang politik atau teori Islam tentang negara. Dari ayat ini ada dua masalah fundamental yang dapat diambil :

a. Dalam kepemimpinan Islam digunakan terminologi "khilafah" sebagai pengganti "hakimiyah", mengingat istilah hakim hanyalah untuk Allah, oleh karena itu setiap penguasa di bumi, meskipun dibawah undang-undang Islam, untuk selamjutnya ia di sebut "kholifah" (wakil) hakim tertinggi. Kholifah tersebut terdiri dari para raja dan hamba-hamba Allah yang tidak seorangpun menguasainya, kecuali satu dzat.

---

[40] Abu A'la Maududi, Politik Alternatif, Op-Cit, hal. 57

[41] Oemar Bakry, Tafsir Rahmat, Mutiara, Jakarta, 1982, hal. 689

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Allah telah menjanjikan orang-orang mukmin tentang pengangkatan kholifah. Tapi Dia tidak mengatakan hendak mengangkat seorang khalifah dari salah satu diantara mereka.[42]

Secara ekplisit hal ini menunjukkan bahwa seluruh mukmin adalah khalifah Allah. Dalam pengertian luas yakni yang tidak didomonir oleh individu, kelompok maupun golongan, namun setiap mukmin adalah khalifah Allah di bumi masing-masing.

Maududi berpendapat, bahwa manusia adalah wakil Tuhan atas dunia, ia mengemban kuasa yang didelegasikan kepadanya oleh Tuhan. Dan dalam batas-batas yang ditentukan, ia dituntut untuk melaksanakan kekuasaan Tuhan.[43] Dan masing-masing dari mereka akan bertanggung jawab kepada Allah, seperti yang telah di sabdakan Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits : "masing-masing kalian adalah seorang pemimpim, (maka) masing-masing kalian bertangguna jawab kepada rakyatnya".[44] Dalam hal ini tiada seorangpun yang lebih rendah kedudukan maupun posisinya dari pada yang lain dalam segala aspek yang ada.

Kata "kuasa" atau "kekhilafahan" akan secara otomatis melayangkan pemikiran kita kepada hak Ilahi, raja - raja atau otoritas kepausan. Al-Qur'an menjelaskan, kekhalifahan Tuhan bukanlah hak asasi istimewa individu, klan

---

[42]Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Op-Cit, hal. 32

[43]Abu A'la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 2

[44]Abu A'la Maududi, Politik Alternatif, Op-Cit, hal. 58. Dan lihat Maududi, Politik Islam Konsepsi dan dokumentasi, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kelompok orang manapun, ia merupakan hak kolektif dari semua yang mengakui kedaulatan mutlaq Tuhan atas diri mereka sendiri dan menganut kode hukum Ilahi yang di sampaikan melalui rasaul-Nya.[45]

Penjelasan mengenai istilah khilafah di atas menjelaskan bahwa tidak ada indifidu atau golongan yang dapat menjadi khalifah, kekuasaan khalifah diberikan kepada seluruh masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat-syarat perwakilan serta menaati prinsip-prinsip tauhid dan risalah. Keseluruhan masyarakat demikian mengemban tanggung jawab khilafah dan setiap orang merupakan bagian dari padanya.[46]

Konsep kehidupan seperti ini oleh Maududi, menjadikan khilafah Islam sebagai suatu demokrasi, yang pada inti dan dasarnya merupakan anti-tesis bentuk pemerintahan teokrasi, monarkhi, dan kepausan.[47]

Ini merupakan titik awal demokrasi Islam, setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak - hak dan kekuasaan kekhalifahan Tuhan dan kerenanya semua individu berderajat sama, tidak ada satu orangpun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya. Badan yang menjalankan urusan negara akan dibentuk melalui perjanjian

---

[45]Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Mizan, Bandung, Terj. Asep Hikmat, 1994, hal. 243

[46]Abu A'la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia, Op-Cit, hal. 3

[47]Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op-Cit, hal. 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan individu-individu ini, dan kekuasaan negara hanya akan merupakan perpanjangan kekuasaan individu yang didelegasikan kepadanya. Opini mereka akan menentukan dalam pembentukan pemerintah.[48] Siapapun yang memperoleh kepercayaan akan memikul kwajiban-kwajiban kekhalifahan atas nama rakyat, dan jika ia kehilangan kepercayaan, maka ia harus meletakkan jabatannya. Dalam hal ini sistem politik Islam adalah bentuk demokrasi yang palin sempurna dari yang pernah ada.[49]

Hal inilah yang menurut Maududi merupakan titik beda yang membedakan demokrasi Islam dan demokrasi barat, dalam demokrasi barat itu didasarkan kepada konsep kedaulatan rakyat secara utuh, sedangkang dalam demokrasi Islam, kedaulatan di tangan Tuhan dan rakyat adalah khalifah-Nya atau wakil-Nya.[50]

Sebagai konsekwensi dari sistem khalifah yang tak membedakan warga negara berdasarkan perbedaab etnis, ras dan golongan, Maududi mengajukan tujuh prinsip bagi kwalifikasi dan tipologi orang-orang yang layak memduduki jabatan dalam lembaga-lembaga tinggi negara.

a. Seseorang tidak dipilih sebagai kepala negara, kecuali atas dasar ketakwaan dan ketinggian akhlaknya.
b. Tidak ada hak istimewa bagi kepala negara didepan hukum.

---

[48] Abu A8la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, Op-Cit, hal. 3

[49] I b i d, hal. 3

[50] I b i d, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kepala negara wajib melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, majlis permusyawaratan haruslah dipilih dari warga negara muslim yang dapat dipercaya.

d. Semua masalah yang diajukan dalammajlis permusyawara - tan diputuskan berdasarkan suara terbanyak, walaupun Islam tidak menjadikan pendapat terbanyak sebagai stan dar benar atau salah.

e. Setiap orang yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan atau berusaha mendapatkan jabatan tersebut, sebaiknya tidak dipilih, sebab dalam Islam tidak ada tempat bagi orang yang ambisius.

f. Anggota majlis tidak boleh dibagi atas beberapa fraksi dan partai, Islam menurut Maududi tidak mengenal sistem partai dalam kehidupan bernegara, pendapat yang muncul dalam sidang majlis diajukan secara pribadi dan setiap anggota majlis bertanggung jawab langsung kepada Allah.

g. Lembaga yudikatif harus mandiri diluar jangkauan intervensi kekuasaan eksekutif.[51]

Pemilihan kepala negara dilakukan majlis syu'ara atas nama ummat dan rakyat. Disini Maududi tidak menjelas kan secara rinci tugas majlis dalam pemilihan, apakah maj lis hanya memilih calon, kemudian pemilihannya dilakukan oleh komunitas muslim ? atau majlis atas nama rakyat mempunyai mandat penuh untuk memilih dan menentukan kepala negara tanpa mengembalikan lagi kepada ummat.

---

[51] Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Op-Cit, hal. 50-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tujuan Negara Islam

Sebagai kelanjutan dari konsep kedaulatan Tuhan, Maududi berpendapat bahwa pembentukan sebuah negara merupakan sebagaian dari misi Islam yang Agung. membangun negara merupakan salah satu kwajiban agama. Oleh karena itu negara yang sudah dibangun perlu dipelihara eksistensinya.

Abu A'la Maududi berpendapat, bahwa tujuan didirikannya negara Islam bukanlah merupakan wahana yang mempunyai tujuan-tujuan yang negatif, akan tetapi mengandung tujuan-tujuan yang positif, artinya tidak hanya bertujuan mempertahankan kemerdekaan negara, mencegah permusuhan antara golongan yang satu dengan yang lain. melainkan lebih jauh lagi mempunyai tujuan yang paling tinggi, yakni memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini mencakup usaha untuk mencegah yang mungkar dan menjebol segala macam kejahatan sampai ke akar - akar nya, sehingga yang ma'ruf dan semua kebajikan yang di ridhai Allah akan membudaya dalam masyarakat.[52]

Pendapat Maududi ini di dasarkan pada ayat suci al Qur'an :

> Orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka tetap mengerjakan sembahyang, dan membayarkan zakat dan menyuruh melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang salah. Dan kepunyaan Allah kesudahan segala urusan. (QS. 22:41)

---

[52] Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi dan Konsepsi, Op-Cit, hal. 39

[53] Zainuddin Hamidy, Op-Cit, hal. 483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamulah masyarakat terbaik yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia, karena kamu menyuruh menger jakan kebajikan dan melarang mengerjakan ketidak - adilan atau kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah,[54] (QS. 3:110).

Dengan melihat ke dua ayat tersebut di atas, lebih lanjut Maududi menegaskan bahwa, negara yang di gambarkan oleh al Qur'an bukan hanya negara yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang negatif saja, akan tetapi bertujuan (melaksanakan) hal-hal yang positif. Dengan denikian tujuan negara Islam bukan hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, untuk melindungi mereka, melindungi seluruh bangsanya, akan tetapi bertujuan lebih mulya lagi yaitu mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah diketengahkan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur'an.[55]

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari sebuah negara adalah pembentukan,pemeliharaan dan pembangunan segala kebajikan yang dalam kehidupan manusia dikehendaki oleh pencipta untuk disuburkan dan mencegah serta memberantas kebatilan-kebatilan dalam hidup manusia yang dikutuk-Nya.[56]

Cita-cita ini adalah kualitas kesucian, keindahan, kebaikan, kebajikan, kesuksesan dan kemakmuran yang dikehendaki Tuhan untuk menghiasi kehidupan ummat-Nya harus

---

[54] I b i d, hal. 87

[55] Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op-Cit, hal, 166

[56] Abu A'la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, Op-Cit, hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangkitkan dan dikembangkan dan bahwa segala bentuk eksplotasi, ketidakadilan dan ketidaktertiban yang dalam pandangan Tuhan, menghancurkan dunia dan merugikan makhluk-Nya, harus diberantas dan dicegah. Islam memberikan kepada kita suatu pedomanjelas tentang sistem moral dengan menyatakan secara positif kebajikan-kebajikan apa yang dibolehkan dan kebatilan-kebatilan apa saja yang di larang. Dengan berpegang pada pedoman ini, negara Islam dapat merencanakan program kesejahteraannya pada segala zaman dan segala keadaan.[57]

Menurut Maududi, mencapai tujuan keadilan sosial dan menata masyarakat yang adil dan makmur diperlukan kekuasaan politik yang digunakan demi untuk menunjang cita-cita tersebut.[58] Allah SWT. Berfirman :

> Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan Allah hendak membuktikan siapa yang menolong-Nya dan Rasul-rasul-Nya, biarpun tidak kelihatan. Allah itu Maha kuat, Maha kuasa.[59] (QS. 57: 25).

Dalam menanggapi ayat tersebut, Maududi berpendapat bahwa besi dijadikan sebagai lambang kekuasaan politik.[60] Kata al-hadid diartikan sebagai kekuatan politik (political power).[61] Ayat tersebut juga menjelaskan misi

---

[57] I b i d, hal. 4

[58] Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op-Cit, hal. 166

[59] Zainuddin Hamidy, Op-Cit, hal. 805

[60] Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Op-Cit,hal. 165

[61] Abu A'la Maududi, Politik Alternatif, Op-Cit, hal. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para Rasul yang mempunyai tugas untuk menciptakan kondisi yang didalamnya rakyat akan mendapatkan jaminan keadilan sosial sejalan dengan norma-norma yang telah di canangkan al-Qur'an yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berdisiplin.[62]

Islam menggunakan kekuatan politik untuk mereformasi masyarakat dan tidak membiarkan masyarakat meloret kedalam tempat terakhir yang paling buruk, inilah yang membuat nabi pernah berdo'a agar para penguasa dimasukkan kedalam golongan orang-orang beriman dan menjadi pendukung-pendukungnya.[63]

Dalam Ayat yang lain Allah berfirman :

> Katakanlah."Ya Tuhanku, masukkanlah aku lewat gerbang kebenaran dan keluarkanlah aku lewat gerbang kebenaran pula. Dan berilah aku dari kehadiran-Mu kekuasaan yang dapat membantuku.[64] (QS. 17: 80).

Maulana Maududi, dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut sebagi berikut :

> "... Anugerahkan kepadaku kekuasaan di bumi dan jadikanlah semua kekuasaan yang ada, semua negara, menjadi pendukungku sehingga dengan kekuatan mantap dari negara tersebut, aku dapat menegakkan kedilan, kebajikan, membasmi kejahatan mengakhiri belenggu korupsi, keliaran dan dosa, memulihkan akibat-akibatnya, sesuai dengan hukum yang telah engkau turunkan.[65]

---

[62] I b i d, hal. 51. Dan lihat Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi Islam, Op-Cit,hal. 165. Serta lihat, Abu A'la Maududi, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Op-Cit, hal. 38

[63] Abu A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi sistem Politik Islam, Op-Cit, hal. 33

[64] Zainuddin Hamidy, Op-Cit, hal. 407

[65] Abu A'la Maududi, Hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam, Op-Cit, hal. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Maududi, ini merupakan pendekatan Islam, dan konsekwensi logis dari hal ini adalah, bahwa negara harus dibentuk berdasarkan pola-pola Islami.[66] Kemudian Maududi menerangkan lebih lanjut tentang beberapa tujuan dibentuknya negara Islam, yang dapat diringkas dalam lima tujuan utama :

a. Untuk menghindarkan diri dari ekploitasi antar manusia, amtar kelompok atau antar kelas dalam masyarakat.
b. Untuk mengatur dan memelihara kebebasan ekonomi, politik, sosial budaya, pedidikan dan agama.
c. Untuk menegakkan keadilan sosial yang seimbang, sesuai dengan kehendak al-Qur'an.
d. Untuk memberantas setiap kejahatan (al-munkarat) dan mendorong setiap kebajikan (al-Ma'ruf).
e. Menjadikan negara sebagai tempat yang teduh yang mengayomo setiap warga negara dengan memberlakukan hukum tanpa adanya diskriminasi.[67]

Dari penjelasan Maududi tersebut tanpak bahwa negara dalam ajaran Islam adalah merupakan instrumen pembaharuan yang terus menerus. Negara, konstitusi dan semua perangkat kenegaraan lainnya dibuat untuk kepentingan rakyat yang harus mengabdi tanpa reserve kepada negara, Sehingga negara menjadi fasitis dan totaliter. Semua

---

[66] I b i d, hal. 33

[67] Abu A'la Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Op-Cit, hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat negara, apalagi pejabat negara, dapat diubah se tiap waktu bila kepentingan rakyat banyak, asal tidak ber tentangan dengan agama, sebagai instrumen pembaharuan (instrumen of reform), negara dengan konstitusinya, lembaga-lembaga perwakilan, lembaga kehakimannya harus mengabdi kepada rakyat bukan sebaliknya, sebab jika itu ter jadi rakyat harus menyembah kepada negara, maka penguasa-penguasa itu pada akhirnya akan menjadi fir'aun atau Namrud modern yang tidak kalah jahatnya dengan Fir'aun dan namrud dalam sejarah klasik.[68]

Untuk menuju terbentuknya suatu negara berdasarkan ajaran Islam dan usaha mencapai tujuan dan mempertahankan eksistensinya, diperlukan adanya semangat juang yang tinggi dan ikhlas dikalangan warga negara itu, menurut ajaran Islam dikenal dengan sebutan jihad.

Para da'i, muballig dan para politikus Islam, di anjurkan untuk selalu membakar semangat jihat dikalangan kaum muslimin sampai terbentuknya suatu negara yang berdasarkan ajaran Islam, jika negara sudah terbentuk, pemerintah berkewajiban menyalurkan semangat dan gelora jihad yang membara dikalangan warga negara dan rakyat secara ke seluruhan, sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi negara dari segala macam ancaman dan sarana untuk mencapai tujuan negara semaksimal mungkin.

---

[68] I b i d, hal. 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jihad menurut Maududi tidan mengenal titik dan tak mengenal kata berhenti, jihad harus selalu ada pada setiap pribadi muslim, menurutnya pengertian jihad tidaklah berarti mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juhad mencakup usaha dan pertarungan kekuatan baik fisik maupun akan untuk melawan dan menagkal segala rintangan yang menghalangi tegaknya sistem dan syari'at Allah di muka bumi.

Adapun tujuan jihad dalam Islam menurut Maududi adalah untuk menghentikan dominasi sistem pemerintahan yang bukan Islam dan meghentikannya dengan hukum. Islam tidak melakukan suatu revolusi untuk suatu negeri atau berapa saja tetapi untuk seluruh negeri.[69] Meskipun pada awalnya tugas dari anggota pergerakan Islam untuk suatu revolusi ditempat ia berada, tapi tujuan utamanya tak lain kecuali revolusi dunia. Setiap idiologi revolosioner yang berguna bagi kemanusiaan manfaat secara unit nasional dan tidak bisa dibatasi dengan satu batasan negeri secara satu persatu atau satu bangsa.

Hamba Allah yang beriman menurut Maududi, selalu berijtihad dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun karena Iblis dan Setan selalu memantau untuk mencari kesempatan menggoda manusia dengan berbagai cara. Untuk itu setiap hamba Allah yang mukmin, utamanya negara harus selalu siap terjun kearena juang.

---

[69] Maryam Jamilah, Biografi Abu A'la Maududi, Risalah , Bandung, 1984, hal. 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id